

# Nusantara Journal of Economics (NJE)

Tersedia online di <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/nje>

Vol. 01, No. 02, Edisi Desember 2019

ISSN: 2714-5204

## ISLAM, KOPERASI, DAN JATI DIRI EKONOMI POLITIK INDONESIA: SEBUAH REVIEW KOMPREHENSIF

Muhammad Nurjihadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

email: [m.nurjihadi@uts.ac.id](mailto:m.nurjihadi@uts.ac.id)

---

---

### ABSTRAK

---

---

---

---

#### Kata Kunci:

ekonomi politik;  
Kapitalisme; Islam;  
Koperasi

**Abstrak:** Dalam konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam. Artikel ini berusaha untuk menggali jati diri ekonomi politik Indonesia guna menemukan harmonisasi antara doktrin keislaman dengan amanah konstitusi. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ilmiah tersebut adalah dengan menggunakan teknik *systematic Literature Review* (SLR). Hasil kajian menunjukkan bahwa secara defacto, praktek ekonomi politik Indonesia sejak zaman Hindia Belanda cenderung berkarakter kapitalistik. Hal ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi dan doktrin ekonomi dalam Islam yang mengedepankan konsep keadilan sosial dan keseimbangan (*tawazun*). Oleh karenanya, sebagai terjemahan atas konstitusi ekonomi Indonesia, telah dikembangkan konsep ekonomi Koperasi. Namun gagasan mengenai koperasi ini gagal untuk berkembang karena tidak mendapat dukungan serius dari pemerintah dan tidak dijiwai secara baik oleh masyarakat. Dengan penekanan yang kuat pada gagasan keadilan sosial, konsep koperasi harusnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Islam Indonesia karena sesuai dengan doktrin keislaman dalam ekonomi yang menganut prinsip egalitarian yang proporsional. Dengan demikian, pengembangan Koperasi harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi Indonesia karena ia merupakan jati diri ekonomi politik negara yang dimandatkan konstitusi sekaligus merupakan jiwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

---

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Oleh karenanya, doktrin-doktrin keislaman secara signifikan mempengaruhi perjalanan panjang sejarah bangsa. Salah satu fase sejarah yang tak lepas dari pengaruh doktrin keislaman adalah bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang diharapkan dapat memutus mata rantai ekonomi kapitalis yang telah melahirkan kemiskinan struktural dan ketidakadilan di Indonesia. Tapi rezim yang mengisi era reformasi justru kian terjebak dalam kapitalisasi ekonomi. Wacana dan upaya penghapusan subsidi oleh pemerintah, privatisasi BUMN, sentralisasi industri, keberpihakan pada konglomerasi besar serta tradisi hutang untuk menutupi defisit anggaran merupakan bukti nyata haluan ekonomi politik kapitalis pemerintah Indonesia.

Sejak bergulirnya reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto, telah terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola kenegaraan Indonesia. Perubahan itu terutama terlihat dalam bidang politik, dimana negara membebaskan setiap orang untuk berkelompok mendirikan partai politik dan menyampaikan aspirasi politiknya. Perubahan mendasar lainnya juga terlihat dengan diberlakukannya otonomi daerah. Tujuan filosofisnya adalah agar daerah bisa mengembangkan daerahnya sendiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Sadar atau tidak, otonomi daerah yang hari ini kita anut hanya merupakan “kepura-puraan ideologis” semata. Secara politis, para elit daerah dihibur dengan memberikan mereka kekuasaan politik lokal di daerah, tetapi secara ekonomi tetap saja daerah adalah subordinasi kepentingan konglomerasi besar yang ada di Jawa. Inilah yang melahirkan ketimpangan ekonomi, daerah menyediakan bahan baku industri yang diolah di sentra industri yang ada di Pulau Jawa. Akibatnya kekayaan alam di daerah luar Jawa tereksplorasi tanpa memberikan manfaat ekonomi berupa kesejahteraan kepada masyarakat lokal di daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi hanya terjadi pada sektor distribusi kekuasaan politik, tidak pada sektor ekonomi yang menjadi pusat kajian dalam paper ini.

Pemerintah kolonial Belanda di masa lalu memaksakan pola pikir kapitalis dalam sistem ekonomi Hindia Belanda (Indonesia), misalnya masyarakat pribumi diharuskan untuk memproduksi bahan mentah hasil pertanian untuk diolah di industri-industri yang ada di Eropa, padahal orientasi ekonomi masyarakat pribumi sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan sosial, bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar (Boeke, 1973). Apa yang disampaikan oleh Boeke tersebut menunjukkan bahwa pola pikir kapitalis yang dianut pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan (terutama pada masa orde baru dan era reformasi sekarang) merupakan warisan dari haluan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.

Timbulnya gerakan radikal yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan mutlak dari penduduk pribumi dibawah pimpinan Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir sebenarnya didasari oleh kemarahan kaum pribumi karena sikap pemerintah kolonial yang mengeksploitasi kekayaan alam kita untuk diolah di Eropa. Pola eksploitasi ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang tunduk pada hukum kapitalis yang menganut azas pasar bebas (*laissez faire*). Atas dasar itulah pergerakan nasional akhirnya diarahkan pada upaya memerdekakan Indonesia dari hegemoni politik ekonomi Belanda. Harapannya dengan kemerdekaan politik, kita bisa mengatur sendiri sistem ekonomi kita tanpa harus terikat dengan sistem ekonomi kapitalis. Itu sebabnya UUD 1945 pada pasal 33 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Pada masa orde lama, pemerintah melakukan nasionalisasi pada semua perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing yang di nasionalisasi itulah yang kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak berorientasi keuntungan semata, tapi juga kepedulian dan keadilan sosial. Pemikiran ini lahir dari konsep Bung Hatta yang disebut koperasi (Rahardjo, 2011).

Kapitalisasi yang massif kembali terjadi di Indonesia pada masa orde baru dibawah rezim Soeharto. Dengan dibantu oleh pemikir-pemikir liberal di zamannya, Soeharto menunjukkan keberpihakan yang ekstrem kepada para

pemodal asing untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Akibatnya asing mendominasi sektor-sektor strategis dalam perekonomian kita. Pada masa inilah terjadi perampokan tanah atas nama investasi oleh para investor asing yang menyisakan konflik hingga hari ini. Pada masa ini, negara memfasilitasi investor untuk berinvestasi di daerah luar Jawa dalam hal penyediaan bahan mentah seperti pada sektor perkebunan dan pertambangan. Sementara di Jawa, investor melakukan investasi dalam bidang industri dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi di daerah luar Jawa. Barang-barang yang tidak bisa diproduksi di Jawa karena keterbatasan teknologi kemudian di ekspor untuk diolah diluar negeri. Ironisnya, kita membeli kembali hasil produksi di luar negeri itu dalam bentuk barang jadi dengan harga yang sangat mahal. Pada masa ini pula koperasi yang menjadi ide kebangsaan kita kehilangan ruhanya. Azas-azas kebersamaan dan kerjasama dalam koperasi hilang digantikan dengan dominasi pemodal besar. Meski nama koperasi masih digunakan, tapi prinsip pengelolaannya telah berubah dari pengayom aktifitas ekonomi masyarakat menjadi unit produksi yang berorientasi keuntungan maksimal. Ini berarti bahwa pemerintah orde baru telah melakukan pelanggaran serius terhadap azas kekeluargaan dalam pengelolaan ekonomi negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945. Hal ini merupakan salah satu pendorong lahirnya gerakan reformasi pada akhir dasawarsa 1990-an, yakni keinginan untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bukan ekonomi pasar.

Sayangnya setelah 20 tahun reformasi, rezim yang mengisi era ini justru cenderung mengkhianati semangat reformasi 1998. Hal ini tercermin dari pola eksploitasi Jawa atas luar Jawa yang masih terus terjadi. Pada level ekonomi nasional, Indonesia juga masih mencirikan ekonomi kapitalis pada era kolonial Belanda. Dimana Indonesia hanya menjadi penyedia bahan baku untuk industri di barat atau di Jepang dan Cina. Akibatnya kita kehilangan potensi pendapatan negara yang sangat besar. Parahnya lagi, kita harus mengimpor produk hasil industri yang menggunakan bahan baku dari Indonesia itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Begitulah kapitalisme, membuat kita terpasung pada kondisi pra sejahtera. Seolah ada kesepakatan bersama bahwa negara-negara dunia ketiga

seperti Indonesia merupakan penyedia bahan baku industri untuk diolah di negara maju.

Situasi ekonomi sebagaimana dideskripsikan diatas tidak sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas dan jati diri sosio-kultural masyarakat Indonesia. Padahal, para pendiri bangsa telah berusaha menyusun konsep perekonomian nasional yang menjadikan gotong royong dan kebersamaan sebagai modal utama. Konsep itu tertulis secara tegas dan jelas pada pasal 33 UUD 1945. Dalam aplikasinya, pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang dikenal dengan koperasi. Istilah koperasi diambil dari istilah *kooprasie* yang berarti bekerjasama. Dengan demikian, para pendiri bangsa ini berharap bahwa perekonomian nasional kita dilakukan atas dasar kerja sama dan kasih sayang, bukan atas dasar persaingan dan keserakahan sebagaimana dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Ironisnya, pasca berakhirnya pemerintahan orde lama dibawah pimpinan Soekarno, Indonesia justeru kembali menganut sistem ekonomi kapitalis yang bertentangan dengan semangat kerja sama, kebersamaan dan gotong royong itu. Praktek kapitalisasi ekonomi nasional itu berlangsung hingga kini, lebih dari 70 tahun sejak kemerdekaan politik Indonesia. Kiranya inilah yang menyebabkan bangsa ini tak kunjung sampai pada cita-cita proklamasi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, reformasi ekonomi adalah keniscayaan yang harus diwujudkan.

Selain bertentangan dengan konstitusi ekonomi Indonesia, kapitalisme juga tidak sejalan dengan doktrin ekonomi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia yang mengedepankan keadilan sosial. Menurut Qardhawi (1995), salah satu sendi ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan (seimbang), ciri keseimbangan ini merupakan jiwa ekonomi Islam. Jiwa dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati serta

iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat ini tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah seperti yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat komunis. Islam berada di tengah-tengah diantara keduanya. Artikel ini berusaha untuk mendalami serta menggali jati diri ekonomi politik Indonesia dari perspektif keislaman dan konstitusi.

## **METODE ANALISIS**

Artikel ini ditulis sebagai hasil pemikiran yang didasarkan atas referensi-referensi relevan. Metode analisis yang digunakan dalam mengembangkan hasil pemikiran ini menggunakan teknik *Systematic Literature Review* (SLR) atau review literatur sistematis, yaitu sebuah teknik analisis yang didasarkan pada hasil-hasil kajian terdahulu yang sudah dipublikasi. Hasil-hasil kajian tersebut dianalisa dan ditinjau secara kritis untuk menjawab masalah utama dalam paper ini, yaitu bagaimana jati diri ekonomi politik Indonesia dalam kaitannya dengan keislaman dan konstitusi negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Haluan Ekonomi Politik Indonesia**

Dualisme sosial ekonomi antara perekonomian barat yang beorientasi pemenuhan kebutuhan pasar dengan perekonomian timur yang berorientasi pemenuhan kebutuhan sosial merupakan isu utama yang diangkat dalam thesis J.H.Boeke. Thesis yang diangkat dari realitas sosial ekonomi di Hindia Belanda ini telah menjadi wacana pembangunan internasional pada pertengahan abad ke 20. Boeke beranggapan bahwa kebijakan kapitalistik pemerintah kolonial tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat pribumi Hindia Belanda. Hal itu karena perilaku ekonomi pribumi lebih digerakkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang dianut, misalnya solidaritas atau gotong royong, bukan untuk mencapai efisiensi produksi guna memaksimalkan keuntungan (Rahardjo, 2011). Dengan demikian,

maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda (Indonesia) berbeda dengan masyarakat Eropa. Pribumi lebih menekankan pada pencapaian kesejahteraan sosial, sementara masyarakat barat menekankan pada pencapaian kebutuhan pasar.

Dualisme ekonomi terjadi pula pada masa pasca kemerdekaan. Dualisme terjadi antara ekonomi kerakyatan yang berorientasi pemberdayaan ekonomi rakyat mikro dengan ekonomi konglomerasi besar yang padat modal. Tapi karena wacana mengenai ekonomi kerakyatan tidak mendapat tempat di media massa, tidak pula diajarkan di kelas menyebabkan istilah ekonomi kerakyatan tidak pernah muncul pada awal kemerdekaan. Sumawiyata dalam Raharjo (2011) adalah penulis pertama tentang ekonomi kerakyatan. Ia terinspirasi dari konsep sosialisme kerakyatan yang dianut gurunya, Sutan Sjahrir. Pandangan Sumawiyata ini bertentangan dengan kecenderungan kebijakan pemerintah orde baru yang ingin me-liberalisasi ekonomi dengan lahirnya UU penanaman modal asing tahun 1967 dan UU penanaman modal dalam negeri tahun 1968 yang diikuti dengan kebijakan liberalisasi, perdagangan dan sistem devisa bebas. Pertentangan antara ideologi ekonomi liberal dan ekonomi kerakyatan dimulai lagi dengan munculnya tulisan Sarbini Sumawiyata itu.

Sebelum berkembangnya wacana ekonomi kerakyatan, telah lahir pemikiran tentang ekonomi pancasila. Konsep ini dicetuskan oleh Prof Emil Salim dalam Raharjo (2011) yang berupaya mensinkronkan kebijakan ekonomi dengan landasan pancasila. Mubyarto dan Boediono menyambut baik pemikiran Emil Salim ini. Namun, Sumawiyata pada tahun 1980 mempertanyakan landasan teoritis dari konsep ekonomi pancasila ini. Ketidakjelasan landasan teori bisa saja membuat ekonomi pancasila diterjemahkan sebagai ekonomi kapitalis dalam realisasi kebijakannya. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan adalah konsep yang lebih jelas, tegas dan aplikatif menurut Sumawiyata. Perdebatan akademis tentang dua konsep ini terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Meski demikian, kebijakan ekonomi pemerintah orde baru tetap dicirikan dengan kapitalisasi dan liberalisasi. Hegemoni pemikiran barat membuat Indonesia

terbuai dengan konsep ekonomi kapitalis dan mengabaikan kekuatan ekonomi lokal yang digerakkan oleh rasa solidaritas dan gotong royong.

Teori Rostow (1960) tentang pertumbuhan ekonomi menjadi kitab pemerintah orde baru dalam perencanaan ekonominya. Karena itulah istilah tahap pra lepas landas dalam sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 80-an s/d 90-an menjadi pembicaraan serius dalam dialog pembangunan ekonomi Indonesia. Teori Rostow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan melewati lima tahap secara berurutan yaitu tahap tradisional, tahap pra lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi missal. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, perekonomian Indonesia memang menunjukkan ciri berada pada tahap pra lepas landas dimana pengelolaan pertanian sudah mulai menggunakan teknologi tepat guna dan berfokus pada prioritas sektor tertentu. Namun krisis 1997 menjadi bukti nyata kesalahan mendasar dalam teori Rostow. Rostow terlalu mengabaikan faktor eksogen (eksternal) dalam proses pembangunan ekonomi.

Gerakan reformasi lahir karena pemerintah dibawah kepemimpinan Soeharto tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari pusaran krisis ekonomi yang menyebabkan krisis multidimensional. Para ekonom “pembisik” Soeharto tidak mampu menemukan cara untuk keluar dari krisis yang mereka ciptakan sendiri itu. Sementara disaat yang sama, korupsi kian meraja rela, pengangguran meningkat tajam, harga bahan pokok naik bahkan hingga lima kali lipat. Satu-satunya solusi jangka pendek untuk permasalahan yang pelik itu adalah pergantian rezim. Oleh karena itulah gerakan reformasi diarahkan pada upaya penggulingan rezim kapitalis otoriter bernama Soeharto.

Kini reformasi yang diharapkan membawa Indonesia keluar dari krisis telah menemui jalan buntu. Tumbangnya rezim orde baru diharapkan dapat memutus mata rantai ekonomi kapitalis yang telah melahirkan kemiskinan struktural dan ketidakadilan di negara kita. Tapi rezim yang mengisi era reformasi justeru kian terjebak dalam kapitalisasi ekonomi. Wacana dan upaya penghapusan subsidi oleh pemerintah, privatisasi BUMN, sentralisasi industri, keberpihakan pada



konglomerasi besar serta tradisi hutang untuk menutupi defisit anggaran merupakan bukti nyata haluan ekonomi politik kapitalis pemerintah Indonesia.

### **Ketimpangan Wilayah : Tinjauan Kritis Atas Pola Hubungan Jawa-Luar Jawa**

Ciri utama dari kolonialisme adalah eksploitasi sumber daya daerah jajahan untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Selama 350 tahun Indonesia dijadikan sapi perah oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan hidup di Negara mereka yang miskin sumber daya alam. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ternyata masih dicirikan oleh ciri kolonialisme itu. Bahkan hingga saat ini, setelah 67 tahun merdeka, pengelolaan Negara Indonesia masih dicirikan dengan kolonialisme. Entahlah, mungkin karena bangsa ini memang bermental bangsa jajahan.

Dalam interaksi ekonomi global, Indonesia dipaksa untuk menghasilkan bahan baku industri yang akan diolah di luar negeri untuk dijual kembali kepada penduduk pribumi. Sudah rahasia umum bahwa Indonesia adalah produsen sawit sekaligus eksportir sawit terbesar di dunia, namun kita juga adalah salah satu negara dengan konsumsi minyak sawit terbesar di dunia. Siapa yang menyangkal bahwa Indonesia adalah penghasil rotan terbesar di dunia, tapi sentra industri barang rotan terbesar di dunia justru ada di China yang tidak memiliki hasil bumi rotan. Indonesia juga penghasil karet terbesar di dunia, tapi industri karet justru terpusat di Yokohama. Serta masih banyak keunggulan komparatif lainnya yang patut kita banggakan sekaligus kita sesalkan karena kita hanya menjadi pengeksportir barang mentah untuk dijual murah ke luar negeri, lalu membeli lagi dari luar negeri (impor) dengan harga yang sangat mahal (Rahardjo, 2011). Dengan fakta ini, apa bedanya Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Hindia Belanda sebelum proklamasi itu..??

Sesuatu yang lebih ironi dan memiris hati terjadi justru dalam interaksi ekonomi dalam negeri kita sendiri. Sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini, kita belum berhenti berdiskusi tentang disparitas, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Jawa yang luas daratannya hanya 6% dari total daratan Indonesia menampung

beban penduduk sebesar 60% dari total penduduk Indonesia. Secara ekonomis, kondisi ini menyebabkan perputaran uang, kekayaan dan hasil produksi terpusat di Jawa. Dampak lainnya adalah tersedianya infrastruktur memadai di Pulau Jawa karena alasan beban jumlah penduduk. Semua hal itu tentu menyebabkan anggaran negara lebih banyak teralokasikan untuk Pulau Jawa.

Sampai pada penjelasan itu, mungkin kita belum menemukan masalah berarti dalam tata kelola ekonomi negara kita. Tapi coba lihat dampak tragis lainnya dari fakta diatas. sistem ekonomi kapitalis liberal yang dianut pemerintah membuat investasi swasta berpusat di daerah Jawa karena alasan ketersediaan sumber daya manusia dan kemudahan akses pasar serta infrastruktur yang memadai. Padahal fakta lain menunjukkan bahwa produksi bahan mentah untuk keperluan industri di Jawa di suplai dari daerah-daerah luar Jawa. Kalimantan dan Sulawesi misalnya yang memiliki bahan baku rotan yang melimpah, tapi industri rotan di Indonesia justru terpusat di Cirebon dan sekitarnya yang bukan merupakan penghasil rotan. Demikian juga dengan industri logam dan pertambangan yang bahan bakunya banyak terdapat di Indonesia bagian timur, tapi sentra industrinya juga terpusat di Jawa. Dengan fakta ini, timbul pertanyaan apa bedanya Jawa dengan Belanda yang menjajah Nusantara di masa lalu ?. Dengan fakta itu, salahkan jika saya mengambil kesimpulan bahwa organisasi (Negara) Indonesia bermakna “penjajahan Jawa atas luar Jawa ??”.

Keberpihakan ekonomi politik pemerintah terhadap sistem ekonomi kapitalis adalah akar dari permasalahan ketimpangan dan penjajahan Jawa atas luar Jawa ini. Dalam hitung-hitungan investor asing, yang ada hanyalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli keadilan dan keberimbangan pembangunan. Oleh sebab itu, Jawa dengan segala keunggulannya (terutama kepadatan penduduk) akan selalu menjadi daya tarik sebagai pusat investasi dengan melakukan eksploitasi kekayaan alam di daerah luar Jawa. Alasannya sederhana dan pragmatis, karena Jawa memiliki sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur memadai, dan yang paling penting Jawa merupakan pasar yang paling potensial.

Jika kebijakan ekonomi politik yang seperti itu terus dipertahankan, pertanyaannya kapan daerah luar Jawa akan menjadi mandiri dan memiliki taraf hidup yang sama dengan masyarakat Jawa..?. Kita tidak bisa menyalahkan investor, sebab mereka berinvestasi dengan mengikuti insting bisnisnya. Seharusnya disinilah negara memainkan perannya sebagai pengatur, pengelola dan pengarah dalam kegiatan ekonomi. Kita bisa belajar banyak dari negeri China. Negeri yang dulunya pernah mengalami krisis kelaparan yang parah, kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia yang berpengaruh. Apa yang dilakukan Cina adalah membangun industri yang dekat dengan sumber bahan bakunya. Negara membangun infrastruktur yang memadai secara adil dan merata di seluruh negeri, bahkan hingga pelosok. Dengan di fasilitasi negara, Cina juga memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif daerah tempat tinggal penduduk. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi investor untuk menolak berinvestasi di daerah penghasil bahan baku. Bandingkan dengan Indonesia saat ini. Infrastruktur dibangun mengikuti pertumbuhan industri di suatu daerah, akibatnya infrastruktur itu hanya dibangun di daerah industri yang tidak lain adalah Jawa. Lalu lihat pula pola pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia. Pelatihan kerja dilakukan tanpa mempertimbangkan keunggulan komparatif daerah. Akibatnya, tenaga-tenaga terampil dan terdidik hasil pelatihan itu harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang didapatkan dalam pelatihan. Tentu saja lokasinya bukan di daerah tempat tinggalnya, tapi di daerah lain yang membutuhkan keterampilannya itu. Sekali lagi, pada umumnya daerah itu adalah Jawa.

Tanpa bermaksud memupuk sifat sentimental dan emosional terhadap Jawa, tulisan ini hanya ingin menyadarkan kita semua terutama pemerintah agar segera merubah haluan ekonomi politiknya. Era reformasi yang kita harap akan memutus mata rantai kapitalisme ekonomi Indonesia justeru melahirkan pemimpin yang lebih kapitalis dari rezim orde baru. Daerah-daerah miskin di luar Jawa itu tidak membutuhkan belas kasihan pemerintah yang hanya disampaikan lewat pidato politik yang retorik. Daerah-daerah itu hanya butuh keadilan dan

keberpihakan, itu saja. Keadilan adalah satu-satunya harapan yang membuat mereka mau bergabung ke dalam NKRI. Jika keadilan itu tidak mereka dapatkan, jangan salahkan jika NKRI ke depan akan terpecah belah seperti Uni Soviet.

### **Pancasila dan Kerancuan Idiologis**

Setiap tahun kita memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah sesuatu yang “sakral” bagi bangsa kita. Karena alasan sakral itulah Pancasila kemudian diajarkan secara sistematis di kelas-kelas, sejak Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Tapi sadar atau tidak, Pancasila yang diajarkan di kelas-kelas itu tidak pernah memberikan kita pemahaman secara konkret tentang apa makna pancasila dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Bahkan guru-guru yang mengajarkan tentang Pancasila itu sepertinya juga tidak memahami tentang apa yang diajarkannya.

Dalam bidang ekonomi, telah lahir pula konsep “ekonomi pancasila” yang dianggap relevan dengan kondisi Indonesia. Tapi sebagaimana kritik Sumawiyata (1980) bahwa landasan teoritis dari konsep ekonomi pancasila itu tidak jelas. Ketidakjelasan itu menyebabkan siapa saja bisa menafsirkan ekonomi pancasila semau dia. Itu artinya tidak menutup kemungkinan ekonomi pancasila juga dipahami sebagai ekonomi kapitalis sebagaimana yang dijalankan oleh pemerintah orde baru yang mengaku berazas tunggal, azas pancasila. Namun demikian menurut Rahardjo (2011), Mubyarto juga tidak sepakat jika ekonomi pancasila diterjemahkan sebagai ekonomi kapitalis. Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi pancasila adalah teori umum (*general theory*) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan.

Kita memahami sejarah lahirnya pancasila sebagai konsesus (kesepakatan) antara para pendiri bangsa sebagai jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan idiologis yang tumbuh di Indonesia. Namun pancasila tidak pernah benar-benar menjadi jalan tengah dalam perjalanan kebangsaan kita. Doktrin pancasila akhirnya dijalankan berdasarkan pandangan idiologis pemegang kekuasaan. Bukankah gerakan radikal PKI di masa orde lama juga

mengatasnamakan pancasila sebagai landasan gerak. Ketika Soeharto yang di *back-up* para ekonom kapitalis berkuasa, kapitalisme dan liberalisme juga tumbuh pesat atas nama pancasila. Pun ketika Gusdur berkuasa, atas nama Pancasila Gusdur juga berupaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan atas nama pancasila itu pula ia “didongkel” dari kursi presiden karena sikap-sikap nyelenehnya. Kita juga tentu masih ingat, ketika atas nama pancasila SBY pada awal tahun ini ingin menaikkan harga BBM, namun atas nama pancasila itu pula rakyat bergerak dan memaksa pemerintah untuk membatalkan kebijakan itu.

Demikianlah pancasila, ketidak jelasan dan kerancuan idiologisnya membuat kita bisa melakukan apapun atas nama pancasila. Dengan fakta itu, masiakah kita perlu meyakini bahwa pancasila itu “sakti” ???. Masiakah kita berpendapat bahwa pancasila adalah idiologi bangsa sebagaimana digembor-gemborkan MPR dan MK..?. Toh pada akhirnya realisasi pancasila itu mengikuti tafsir idiologis (bukan pancasila) penguasa. Meski MPR berupaya untuk membuat tafsir tetap atas pancasila itu, tapi tetap saja realisasinya bias. Kondisi ini tentu membuat kita sulit mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebab sebuah pendapat yang bertolak belakang sekalipun sama-sama mengatasnamakan pancasila untuk mempertahankan pendapatnya.

Kita harus menyelesaikan permasalahan filosofis bangsa ini. Kita harus berani dengan tegas memilih idiologi kebangsaan yang jelas, bukan idiologi yang rancu dan multitafsir. Ada banyak idiologi yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berlandung dibalik ketidakjelasan makna pancasila itu. Memang sulit untuk menetapkan salah satu idiologi itu sebagai dasar negara. Sebab jika salah satu idiologi disyahkan serta dilegalkan sebagai dasar negara secara formal, bisa jadi akan timbul pemberontakan dari idiologi-idiologi yang lain. Disinilah kita perlu arif dalam mengambil sikap. Jadi sekarang kita punya dua opsi yang sama-sama sulit. Satu memperjelas idiologi kebangsaan kita, apakah syariah Islam, komunis atau bahkan liberal kapitalis dengan resiko instabilitas politik atau bahkan pemberontakan. Dua, mempertahankan pancasila yang dengan ketidakjelasan maknanya setiap idiologi yang berkembang bisa berlandung, tentu saja dengan kesiapan menanggung resiko bahwa kita tidak akan pernah mampu

mengambil keputusan-keputusan strategis untuk memajukan bangsa ini.

### **Menterjemahkan Ekonomi Islam Sebagai Solusi**

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, termasuk kegiatan ekonomi. Dalam Islam bentuk konkret kesuksesan manusia adalah dengan menjadi penghuni surga. Untuk itu Islam memiliki aturan, prinsip serta konsekuensi- konsekuensi yang harus dilaksanakan baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam seluruh aktifitas hidupnya. Islam mengambil kaidah terbaik antara pandangan kapitalis dan komunis secara seimbang. Kedua sistem itu terbukti telah gagal berlaku adil kepada hak awam (kapitalis) dan hak individu (komunis). Dengan panduan Al-Qur'an dan hadis, manusia dapat keluar dari kezaliman sistem ekonomi itu. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi dalam Islam akan sangat tergantung pada keseimbangan antara keperluan kebendaan dan kerohanian manusia (Rivai & Usman, 2012).

Jika sistem kapitalis menjadikan kelangkaan (*scarcity*) sebagai isu utama mengingat kelangkaan adalah fenomena yang menjelaskan kekuatan tarik menarik antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka ekonomi Islam menjadikan distribusi kekayaan sebagai isu utama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki komitmen dan kepedulian yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berdimensi materi tapi juga kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya bisa didapat melalui relasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Oleh karenanya, memaksimumkan output dalam Islam harus disertai dengan adanya jaminan bagi usaha-usaha yang ditujukan pada kesehatan ruhani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta perdamaian yang fair pada semua tingkat interaksi manusia dalam masyarakat (Chapra, 2000).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk dua tujuan utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi (QS 51: 56; QS 2: 30). Karena itu, semua tindakan manusia di dunia adalah sebagai

wakil Allah Swt untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhannya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah Swt di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan Allah Swt. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam, rivai (2012) menjelaskan bahwa Islam mengharuskan manusia untuk bekerjasama dan tolong menolong. Manusia dilarang melakukan eksploitasi dengan mengambil resiko yang melebihi kemampuan wajar untuk mengatasi resiko tersebut.

Ekonomi Islam memiliki makna dan ruang lingkup yang sangat luas, sehingga tidak mungkin penulis jelaskan secara detail dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya mencoba untuk menterjemahkan konsep ekonomi Islam itu secara praktis untuk kepentingan jangka pendek. Perhatian mendalam terhadap keadilan distribusi pendapatan, pencapaian kesejahteraan yang tidak hanya berdimensi materi serta penekanan terhadap pentingnya tolong-menolong dan bekerjasama dalam aktivitas ekonomi perlu kita terjemahkan secara praktis agar bisa diterima oleh semua kalangan. Hal ini mengingatkan sebagian orang di negeri ini masih *phobia* terhadap penerapan ekonomi Islam secara utuh. Kata Islam masih dianggap sebagai “momok” yang mengancam keutuhan negeri jika diakui secara legal-formal sebagai haluan politik atau dasar negara. Oleh karenanya kita perlu memiliki konsep penengah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi juga bisa diterima oleh logika sekuler di negeri ini. Sekali lagi, konsep ini hanya bersifat sementara, untuk kepentingan jangka pendek untuk kemudian mencapai tujuan jangka panjang, yaitu islamisasi ekonomi secara legal formal.

Koperasi merupakan konsep usaha yang memiliki kemanfaatan sosial (*social benefit*) selain untuk tujuan keuntungan. Koperasi dikembangkan dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan tolong menolong. Tentu hal ini sesuai dengan anjuran Islam. Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat lunak yang lengkap mengenai koperasi, mulai dari UUD 1945 (pasal 33), berbagai UU tentang koperasi, dan bahkan Indonesia telah memiliki departemen khusus yang

menangani masalah koperasi. Namun demikian, Rahardjo (2011) mengutip data dari ICA (*International Cooperative Alliance*) menyatakan bahwa tidak satupun koperasi Indonesia yang masuk dalam 300 besar dunia.

Apalah makna sebuah aturan, jika tidak diikuti dengan realisasi yang baik. Sampai sejauh ini, koperasi di Indonesia hanya dipersepsikan sebagai sebuah usaha mikro yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang tergabung dalam suatu koperasi. Pendanaan koperasi pun masih bergantung pada bank. Akibatnya koperasi di Indonesia sering mengalami masalah pada ketidak harmonisan hubungan antar anggota yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan didalamnya. Sebagai sebuah usaha mikro, koperasi dijalankan sebagai unit produksi untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan demikian, koperasi sejauh ini tidak jauh beda dengan perusahaan non koperasi yang kepemilikan sahamnya tidak didominasi oleh satu orang. Perbedaannya hanya ada pada skala usaha. Akibatnya, koperasi sulit bersaing dengan produk perusahaan-perusahaan besar.

Nitisastro dalam Raharjo (2011) pernah mengkritik pandangan Wilopo-mantan perdana menteri-pada tahun 1953 yang dalam makalahnya menyatakan bahwa koperasi dalam konteks UU 1945 hanyalah suatu badan usaha mikro, padahal menurut Nitisastro, UUD '45 pasal 33 mengacu pada susunan perekonomian nasional, sehingga kalimat "usaha bersama" merupakan sebuah konsep makro. Sebagai konsep makro, maka koperasi harus menjadi strategi nasional yang utama dalam membangun ekonomi Indonesia. Tapi sampai sejauh ini, pandangan Nitisastro itu tidak mendapat tempat yang layak di para pengambil kebijakan. Birokrat negeri ini lebih senang meng-copy paste konsep ekonomi barat yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan kita. Padahal para birokrat itu sadar betul bahwa dengan mengikuti konsep ekonomi barat berarti menempatkan kita sebagai Negara perah (jika tak mau disebut sapi perah) oleh negara-negara industri yang miskin sumber daya di barat sana.

Koperasi tidak boleh dijalankan seperti perusahaan non koperasi. Koperasi harus dimaknai sebagai sebuah lembaga sosial yang menaungi



beberapa unit produksi yang ada dibawahnya. Dengan demikian, koperasi bisa terdiri dari beberapa unit produksi yang saling terkait satu sama lain. Sebagai contoh, sebuah koperasi pertanian akan membawahi beberapa unit produksi; (1) petani (*on farm*) itu sendiri sebagai penghasil bahan baku pertanian, (2) unit produksi industri kecil menengah yang mengolah hasil pertanian itu (aktifitas *off farm* pedesaan), (3) unit produksi pemasaran yang akan memasarkan atau mendistribusikan produk olahan ataupun produk mentah dari aktifitas pertanian. Dengan konsep ini, maka kebocoran ekonomi tidak akan terjadi dengan massif. Nilai tambah yang didapat dari usaha akan berputar didalam lingkungan atau anggota koperasi itu sendiri. Bayangkan jika semua desa masing-masing memiliki koperasi yang model ini, maka bisa dipastikan desa-desa kita akan menjadi maju dan tidak mau menambah beban kota dengan bermigrasi ke kota.

Konsep koperasi diatas penulis yakini sebagai solusi tepat untuk mengurangi gap atau ketimpangan (*disparity*) antar wilayah, terutama ketimpangan desa – kota. Konsep yang mirip seperti ini sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh para pengusaha pribumi di masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, para priyai pribumi mengembangkan konsep ini untuk menyaingi kuatnya dominasi ekonomi etnis tionghoa dan penjajah Belanda. Hasilnya fantastis, para pengusaha pribumi dari kaum priyai itu mampu mengalahkan dominasi etnis tionghoa, meski tidak mampu mengalahkan perekonomian Belanda yang didukung kekuatan politik dan militer. Saat ini pun sebenarnya sudah ada koperasi yang seperti itu, seperti Koperasi Pariwisata “Catra Gemilang” di lingkaran Borobudur. Koperasi itu diinisiasi secara swadaya oleh masyarakat. Jika saja pemerintah lebih pro aktif mengembangkan model koperasi seperti ini dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dll maka kita bisa berharap wajah kemiskinan Indonesia akan segera berubah. Hanya saja, koperasi saat ini hanya menjadi program atau proyek di kementerian Koperasi dan UKM, sementara kementerian yang lain semakin massif menjalankan ekonomi kapitalis berbasis modal asing.

Koperasi merupakan konsep ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Meski demikian, konsep koperasi terlalu sempit untuk

memahami konsep ekonomi Islam yang luas dan detail. Oleh karenanya, pengembangan koperasi dapat pula dianggap sebagai upaya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam periode waktu yang lama pemerintah Indonesia telah mempraktekkan haluan ekonomi politik kapitalis yang diwariskan penjajah Belanda yang menempatkan Indonesia sebagai subordinasi dari kepentingan ekonomi negara industri maju. Lebih dari itu, kapitalisme tersebut juga telah mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, tidak adil dan tidak pro rakyat.

Selain itu, salah satu penyebab lambannya perkembangan ekonomi Indonesia adalah ketidakjelasan pijakan idiologis dalam melaksanakan kebijakan ekonomi politik. Pancasila yang dianggap sebagai idiologi khas negara nyatanya justru melahirkan instabilitas sosial-ekonomi-politik karena Pancasila diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing kelompok kepentingan. Seharusnya, Pancasila ditegakkan oleh pemerintah dengan secara konsisten memberikan dukungan yang massif dan menyeluruh dalam menerapkan konsep ekonomi Koperasi yang merupakan jati diri ekonomi politik Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. Terlebih koperasi merupakan konsep ekonomi yang paling sesuai dengan doktrin-doktrin agama Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Artinya, pengembangan koperasi, selain merupakan wujud kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, ia juga merupakan bentuk penghormatan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Al-Kareem

Al-Ghazali, Abdul Hamid. 2010. *Pilar-Pilar Kebangkitan Ummat*. Al-I'tishom Cahaya Ummat: Jakarta

Boeke, JH. Burger. 1973. *Ekonomi Dualistis: Dialog Antara Boeke Dan Burger*, diterjemahkan dengan pengawasan dewan redaksi. Bhratara: Jakarta

- Burger, DH. 1957. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, terjemahan. Prajudi Atmosudirjo Jilid I: Jakarta
- Chapra, Muhammad. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan: Ikhwan Abidin Basri. Gema Insani Press: Jakarta
- Eriyatno. 2011. *Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Mahendra, IGN. 2007. *Bergerak Bersama Rakyat*. Resist Book: Yogyakarta
- Qardhawi., Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press: Jakarta
- Rahardjo, M. Dawam. 2011. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. IPB Press: Bogor
- Rivai dan Usman. 2012. *Islamic Economic and Finance*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rostow, W.W. 1960. *The Stage Of Economic Growth, A Non Communist Manifesto*. Cambridge university press.
- Rustiadi, Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crespent press: Bogor.
- Swasono, Edi Sri. 2011. *Makalah: Timbangan Terhadap Buku Karangan Prof. Eriyatno Berjudul Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi. Bangsa*. Bogor